

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adjie, Habib, 2008, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*. PT. Refika Aditama, Bandung.

-----, 2011, *Hukum Notaris Indonesia tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung.

Andasasmita, Komar, 1984, *NOTARIS I cetakan kedua*, Sumur Bandung, Bandung.

Atmosudirdjo Prajudi (II), 1994, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

G. Salim HS, 2018, *Peraturan Jabatan Notaris*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.

HR, Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Muhammad, Abdulkadir, 2006, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Prodjodikoro, Wirjono, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Edisi 3, Redaksi Refika, Bandung.

-----, 2014, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Subekti, R., 1980, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta.

Soeharto, Bohar 1989, *Menyiapkan Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi-Thesis)*, Tarsito, Bandung.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengatur Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

Suharsimi Arikunto, 1998, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi Keempat, Rineka Cipta, Jakarta.

Sulhan, Irwansyah Lubis dan Anhar Syahnel, 2018, *Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Paduan Praktis dan Mudah Taat Hukum)*, Mitra Wacana Media, Jakarta.

Sumardjono, Maria SW, 2014, *Bahan Kuliah Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Tobing, G.H.S. Lumban, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4432).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No.3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pemindahan dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2016 Tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris.

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 398/PID.B/2015/PN.Smn.

Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 41/PID/2016/PT.YYK.

C. Tesis

Erikson Roni Pandapotan Sinaga, 2018, Pelaksanaan Peralihan Protokol Notaris Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, *Tesis*, Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Gajah Mada Yogyakarta.

Sinta Desmakarti, 2018, Penyerahan Protokol Bagi Notaris Yang Dijatuhi Sanksi Pidana Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap (Analisis Kasus THY), *Tesis*, Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Gajah Mada Yogyakarta.

D. Jurnal

Abdul Nasir, Gamal *Kekosongan Hukum dan Percepatan Perkembangan Masyarakat*, Jurnal Hukum Replik, Volume 5 No.2, September 2017.

Amy Azyati, Nur 2015, *Pemberian Sanksi Terhadap Notaris Yang Telah Dijatuhi Pidana Dengan Ancaman Hukuman Kurang Dari Lima Tahun*, Jurnal Ilmiah: Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya.

Dwi Sukma Cahyani, Ida Ayu Md, *Kepastian Hukum Penyerahan Protokol Notaris Kepada Penerima Protokol*, Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, 2016-2017.

Hatta Isnaini Wahyu Utomo, Auliaurrosidah, *Sanksi Administratif Terhadap Notaris Yang Menolak Menerima Protokol*, Jurnal Kenotariatan Narotama, Volume 1 Nomor 2, Agustus 2019.

E. Internet

Badan pengembangan dan pembinaan Bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/narasumber>, diakses pada tanggal 17 Desember 2019.

Badan pengembangan dan pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/memberikan>, diakses pada tanggal 28 Januari 2021, pukul 23.11 WIB.

Badan pengembangan dan pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/letak>, diakses pada tanggal 29 Januari 2021, pukul 15.34 WIB.

Badan pengembangan dan pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/keberadaan>, diakses pada tanggal 1 Februari 2021, pukul 10.17 WIB.